

*Krisis Pengamalan Pancasila dan Perlunya Penguatan
Ruang Publik Melalui Etika Komunikasi: Sebuah Pendekatan
Etika Keutamaan*

Alexander Seran

ABSTRAK: Krisis pengamalan Pancasila dalam berbagai pemberitaan media menimbulkan salah persepsi yang cenderung menyalahkan media sebagai biang kerok. Sebaliknya pengamat dan analis sosial atas peran media menilai penguatan ruang publik politik untuk demokrasi tidak tanpa media. Menggunakan media dalam mempromosikan Pancasila adalah suatu keharusan untuk membangun citra positif tentang Pancasila representasi moralitas budi luhur yang menyatakan kehormatan dan kewibawaan sebagai bangsa berbudaya. Fungsi media sebagai sarana pencitraan harus digunakan secara bertanggung jawab untuk memproduksi insight mengenai pendidikan moral yang oleh Jean Baudrillard dinamakan *sign value* dari Pancasila. Pancasila yang sejatinya adalah prestise moralitas budi luhur harus digelorakan citra melalui media yang menyatakan kehormatan dan kewibawaan sebagai dasar hukum dan pandangan dunia masyarakat majemuk. Oleh sebab itu, pemeliharaannya sebagai *sign value* tidak tanpa penggunaan media.

KATA KUNCI: Krisis, media, Pancasila, dasar hukum, moralitas, dan dunia kehidupan

ABSTRACT: *The crisis of the practice of Pancasila in various media coverages gives rise to wrong perceptions that tend to blame the media as a culprit. Otherwise social observers and analysts over the role of the media rate strengthening political public space for democracy is not without the media. Use of the media in promoting the Pancasila is a must to build a positive image about Pancasila representation of morality budi luhur who claimed the honor and authority as a cultured nation. The function of the media as a means of imaging should be used responsibly for producing insight regarding moral education by Jean Baudrillard called a sign value of Pancasila. Pancasila which*

in fact is the prestige of the morality of budi luhur digelorakan image should be through the medium of which stated the honor and authority as the basis of law and pluralist society's view of the world. Therefore, its preservation as a signed value not without the use of the media.

KEYWORDS: *Crisis, media, Pancasila, basic law, morality, and lifeworld*

1. PENDAHULUAN

Tiga pernyataan berikut: Amalkan Pancasila #KitaBhinneka #KitaIndonesia secara tersurat adalah tiga kalimat tersirat di dalamnya tiga makna masing-masing adalah kalimat (1) imperatif, (2) dan (3) adalah kalimat deklaratif. Mengapa penutur memulai dengan kalimat (1) perintah? Alasannya ada di pernyataan/ kalimat (2) dan (3) yang bersifat deklaratif karena ketiganya menyatakan sebuah *insight* tentang situasi yang dihadapi masyarakat dalam ruang publik yakni, krisis. Apa yang disampaikan penutur adalah sesuatu yang nyata sebagai *Das Sein* yakni, ancaman akan kesatuan oleh keberagaman yang selama ini menjadi cita-cita dan harapan, *Das Sollen*, yang dengan niat diperjuangkan untuk mewujudkan integrasi sosial yang lebih solid dan kuat. Itulah alasan penempatan kalimat pertama sebagai perintah untuk mengatasi kenyataan, *Das Sein* yakni, krisis melalui keharusan, *Das Sollen* yakni, mengamalkan Pancasila karena kita berbeda-beda, hidup di lebih dari 17.000 pulau sebagai penduduk yang berjumlah lebih dari 200 juta dengan latar belakang etnis yang terdiri dari 300 kelompok dan berbicara dalam 500 bahasa.¹

2. APA ITU KRISIS, SEBAB-SEBAB KRISIS, DAN CARA MENGATASI KRISIS

2.1. Pengertian Krisis

Dalam ilmu pengetahuan, Thomas Kuhn (1922-1996) mengatakan bahwa krisis menjadi bagian struktural (unsur penentu) dalam revolusi ilmu pengetahuan. Sebagaimana tantangan menjadi bagian structural dalam perkembangan kepribadian, krisis menjadi bagian structural dalam

perkembangan ilmu pengetahuan, demikian Kuhn dalam *The Structure of Scientific Revolutions* (1996). Orang yang matang biasanya telah melampaui berbagai krisis sebagai bagian dari pengalaman hidupnya. Kembali kepada Thomas Kuhn, ia mengatakan bahwa dalam kondisi normal, ilmu pengetahuan bekerja dengan prosedur yang baku (*normal science*) dalam menghasilkan ilmu pengetahuan. Pada titik tertentu, perangkat kerja yang baku tadi tidak dapat digunakan atau penggunaannya membawa hasil yang menyimpang. Situasi ini dinamakan anomali. Dalam kurun waktu yang panjang situasi anomali menimbulkan masalah karena terjadi kekacauan dalam kinerja ilmu pengetahuan. Ini adalah krisis, yang terjadi karena perangkat kerja yang baru belum ada, sedangkan yang tadinya digunakan sekarang ini tidak berfungsi. Teori baru muncul ketika ia menawarkan perangkat kerja yang *fit* (sesuai) dan proper sehingga bisa digunakan menjawab tantangan yang dihadapi. Krisis adalah fakta yang bukan untuk ditangisi tetapi tantangan yang harus diatasi. Ilmu pengetahuan tetap ada dan dikembangkan dengan cara-cara baru yang mampu mempertahankan dan mengembangkannya. Neo-pragmatis Amerika Serikat, Richard Rorty (1931-2007) menyetujui pemikiran Kuhn sebagai sebuah kenyataan yang secara jelas menyatakan keterbatasan manusia yang kendati merasa pada titik tertentu sudah mencapai kebenaran melalui sebuah cara pandang namun pada kenyataannya setiap cara pandang memiliki keterbatasan (*contingency*) sehingga krisis menjadi bagian dari logika perkembangan pengetahuan manusia.² Menurut filsafat sebelumnya [dan kini] berbicara tentang sesuatu dengan menekankan apa yang diyakini benar sebagai “final vocabulary” sehingga apa yang diterima begitu saja sebagai mutlak benar kini tidak ada dasar yang kuat untuk mempertahankannya.³ Sejalan dengan pemikiran Kuhn, krisis merupakan kondisi lahirnya paradigm baru menggantikan apa yang oleh Rorty dinamai “final vocabulary” yang pada masa tertentu mengalami anomali sehingga menimbulkan krisis yang memungkinkan “final vocabulary” atau dalam bahasa Kuhn paradigm baru.

Ahli filsafat sejarah, Arnold Toynbee (1889-1975) berkebangsaan Inggris menulis dalam *A Study of History* (1962) menegaskan bahwa perkembangan peradaban dunia mengikuti mekanisme *challenge and response* yang artinya respons manusia secara tepat pada sebuah tantangan yang dihadapinya akan menciptakan kemajuan peradaban, lahirnya kebudayaan baru. Hal ini senada dengan asumsi dari Kuhn dan Rorty bahwa pengetahuan manusia terbatas dan krisis merupakan hal yang biasa dalam perkembangan pemikiran manusia khususnya dan kebudayaan pada umumnya. Lebih lanjut Toynbee mengatakan bahwa respon yang demikian biasa dalam pengembangan kebudayaan dan umumnya respons seperti itu bermula atau berasal dari sebuah kelompok kecil dalam masyarakat yang ia namakan *creative minority* (Toynbee, A, 1962). Oleh sebab itu tidak usah terlalu khawatir jika sebagian besar anggota masyarakat belum sampai titik pemahaman akan masalah dari gemuruh intoleransi dan perilaku antisosial yang kini sudah menguatirkan karena masih ada jalan untuk melewatinya jika masih ada orang yang peduli.

2.2. Sebab Krisis

Orang yang tidak peduli biasanya kebal terhadap tidak berfungsinya sesuatu yang biasa. Sebaliknya, orang yang peduli mudah merasakan ada yang kurang. Seperti penikmat musik larut dalam harmoni dan segera bereaksi ketika sesuatu hal menjadikan *false* pada pendengaran. Jika yang bersangkutan sedang memainkan alat musiknya maka ia kan dengan cepat memeriksa sambungan kabel, mengecek volume dan meneliti pasokan energi (*power*) listrik, dll. Hal yang sama terjadi pada komunikasi dalam kehidupan bersama, ketika batas-batas yang menjadikan kehidupan bersama berjalan normal akan berubah menjadi tidak normal ketika batas-batas itu dilampaui. Orang yang tidak peduli batas disebut seenak *udel*, masa bodoh, nekat, dll sehingga perilakunya menimbulkan kerusakan dan bisa tidak tanggung-tanggung memperluas eskalasi konflik itu merembet ke mana-mana.

Jadi salah satu sebab dari krisis adalah tidak peduli, masabodoh, dan semaunya. Intoleransi bermula pada ketumpulan rasa yang terakumulasi menjadi kebiasaan yang memupuk watak penjahat. Kejahatan dengan mudah dilakukan apabila situasi yang dihadapi menyatakan hal yang berlawanan dengan kehendaknya sehingga watak antisosialnya terpicu untuk melawan apa yang menurutnya tidak sesuai dengannya. Beban hidup yang berat entah karena nasib kurang beruntung atau malas membuat orang-orang yang berwatak intoleran tidak suka melihat orang lain begitu mudah hidupnya apalagi menikmati kemudahan hidup secara mencolok sehingga dibaca sebagai perilaku penghinaan. Boleh jadi, tidak ada kesengajaan menikmati kemudahan hidup sebagai memamerkan kekayaan akan tetapi kurang peka terhadap lingkungan dapat menjerumuskan seseorang dalam kesulitan “dikasari” sekalipun ia tidak berlaku kasar.

Jadi alasan lain dari krisis adalah lemahnya refleksi. Menjalani hidup tanpa refleksi menjadikan seseorang “buta” untuk melihat dirinya pada potret sosial dari lingkungan hidupnya. Pendidikan karakter yang seyogianya memoles gambaran diri dari realitas sosial yang ada tidak dilakukan baik dalam pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Perilaku anti sosial dalam berbagai bentuknya adalah reaksi yang muncul dari sebab berantai maka akan salah total jika penilaian kita tidak secara cerdas melihat dari berbagai sisi yang saling terkait. Seringkali orang menghujat kejahatan yang dialaminya atas dasar *prejudice* dan bukan refleksi yang menempatkan diri sebagai bagian dari permasalahan. Teknologi komunikasi yang dimanfaatkan hanyalah sarana maka penggunaannya untuk tujuan berbeda dapat terjadi, misalnya untuk mencegah terjadinya kejahatan atau malah membantu menggandakan kejahatan. Soalnya adalah sikap kritis dalam memanfaatkan teknologi. Oleh sebab itu, mengolah setiap informasi secara tepat dan benar adalah penting sebelum menyebarkan melalui peralatan komunikasi yang dimiliki. Jadi, salah persepsi pun bisa menjadi pendorong terjadinya kejahatan jika pelakunya tidak paham akan masalah dan tidak tahu menggunakan teknologi. Ini adalah krisis yang

ditimbulkan oleh sikap gegabah tanpa pengendalian diri.

Orang yang mampu mengendalikan diri bukanlah orang yang berwatak lemah sebagaimana dipersepsi oleh masyarakat sebagai pengecut. Sebaliknya orang yang nekad bukanlah pemilik watak terpuji sebagaimana salah dipersepsi masyarakat. Orang nekad dan pengecut sama-sama berwatak lemah karena pengecut tidak berani berbuat apa-apa, sebaliknya orang nekad berbuat melampaui apa yang dituntut sebagai keharusan bagi orang berani. Di sini berani merupakan keutamaan yang penting untuk diajarkan sedangkan pengecut dan nekad adalah kebalikan dari keutamaan keberanian yang harus di jauhi dari bertindak moral. Dalam keberanian, ketahanan diri dan keadilan dilatih sebagai trilogi keutamaan bagi manusia berwatak luhur.

Dari uraian di atas, menjadi jelas bagi kita bahwa salah satu sumber krisis adalah lemahnya pendidikan watak dan karakter. Dalam pendidikan formal, kurikulum menekankan pendidikan kognitif sebagai pembekalan peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membantu mereka dengan mudah memperoleh pekerjaan dalam pasar tenaga kerja. Sebaliknya pendidikan watak dan karakter tidak benar-benar ditanamkan dalam pendidikan keluarga dan masyarakat yang sibuk bersaing untuk meluluskan anak-anak mereka melalui pendidikan yang di-setup oleh kebutuhan pasar kapitalis. Dengan kata lain, sumber krisis yang melatarbelakangi perilaku antisosial dewasa ini sebagian besar dipikul oleh dunia pendidikan formal dan informal yang keliru mempersepsi kemajuan secara teknokratis dan lupa membangun fondasi yang kuat bagi pendidikan karakter.

Perbedaan generasi di satu pihak dan sempitnya ruang interaksi sosial yang melibatk semua generasi di dalamnya menambah rumitnya mengurai sebab dan alasan tunggal dari krisis intoelransi sementara itu pendeknya jarak dan keserentakan pengalaman semakin mengaburkan batas generasi sehingga pola kepemimpinan tradisional tergerus dan digantikan oleh siapa yang tahu dan mampu menggunakan teknologi.

Kebhinnekaan terancam oleh keseragaman pola perilaku yang dikendalikan teknologi sementara politik identitas berusaha mengerem identitas baru yang diciptakan oleh teknologi. Teknologi dituduh sebagai “musuh” peradaban. Akibatnya, teknologi dikuasai tetapi tidak digunakan sesuai perangkat peradaban baru. Integritas sosial masyarakat majemuk sebaliknya digunakan untuk memperkuat identitas kelompok dan menghasilkan persaingan yang bernafas perang suku, agama, ras, dan antar golongan yang semakin tinggi dan kompleks. Lalu peradaban baru yang dicita-citakan para pendiri bangsa untuk tumbuh sebagai taman kehidupan warna-warni sirna menjadi panggung pergulatan dan saling memangsa. Oleh sebab itu, jika sinergi kemajemukan tidak dikelola menjadi kondisi yang saling menunjang untuk pertumbuhan toleransi maka bersiap-siaplah kita menggotong teknologi yang ada di tangan ke tempat sampah karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mensyaratkan kemajemukan masyarakat dalam jejaring yang dirajut secara bijak dan cerdas.

2.3. Mengatasi Krisis

Tidak mudah membicarakan bagaimana krisis dapat diatasi karena krisis dapat pula berlaku pada pembicaraan yakni, “krisis membicarakan krisis”. Krisis yang terjadi sebagai keadaan enggan membicarakan krisis terjadi di awal memikirkan untuk membicarakan krisis. Ada pula krisis yang berupa *deadlock* dalam pembicaraan sehingga sulit dibayangkan sebuah konsensus atau bahkan disensus dapat dicapai. Konsensus dan disensus sebagai hasil pembicaraan bersama merupakan kesepakatan atau sepakat untuk tidak sepakat. Baik konsensus maupun disensus, keduanya terjadi hanya jika ada pembicaraan, komunikasi. Oleh sebab itu, cara biasa untuk mengatasi krisis adalah membicarakan bagaimana keluar dari situasi. Karena krisis adalah ancaman (*threat*) yang membahayakan (*danger*) hidup bersama maka krisis dapat disiasati dengan membicarakannya untuk mengetahui esensi dan mencari jalan keluar. Jadi, peluang (*opportunity*) untuk mengatasi krisis adalah pembicaraan bersama, komunikasi. Hasil

dari pembicaraan bersama adalah pemahaman yang lebih baik akan permasalahan. Dari pemahaman itu, jalan kepada persetujuan terbuka termasuk persetujuan untuk tidak setuju. Ideal dari pembicaraan bersama adalah persetujuan yang didasarkan pemahaman timbal balik maka persetujuan untuk tidak setuju pun mengandaikan syarat yang sama agar berlaku efektif sebagai manifestasi respek akan perbedaan.

Cara mengatasi masalah krisis intoleransi seperti menyempurnakan saluran komunikasi namun para ahli percaya dan yakin bahwa kunci untuk membuka ketertutupan satu terhadap yang lain adalah komunikasi. Mengapa? Para ahli menjelaskan penelitian mereka mengenai masalah krisis intoleransi bertentangan dengan hakikat manusia sebagai subjek yang mampu berbicara dan bertindak maka berbicara tidak sekedar untuk membuka relasi tetapi lebih dari itu adalah aktualisasi kodrat manusia sebagai *speaking animal*. Melalui bicara sebuah relasi tercipta tetapi juga seseorang menyatakan dirinya sebagai eksistensi. Dengan bicara, orang saling mengenal dan dengan itu bertindak sebagai pribadi (*acting person*) yaitu, mengkoordinasi tindakan bersama untuk mengatasi sebuah situasi problematis.⁴ Sejalan dengan Kuhn dan Rorty, Habermas memandang krisis sebagai masalah kontingensi maka krisis harus dilihat dalam kerangka pengembangan rasionalitas komunikatif karena di dalam krisis ada pembelajaran mengenai siasat untuk mengatasi sejauh siasat dijadikan sarana dan bukan tujuan komunikasi. Dalam legitimasi krisis, Habermas membuka kesadaran akan bahaya intoleransi dapat diatasi dengan mengaktifkan kemampuan manusia berbicara dan bertindak untuk mengatasi irasionalitas pengikaran kodrat manusia melalui tindakan yang didasari pencerahan rasio komunikatif.⁵

Karl-Otto Apel (1922-2017) dalam *Karl-Otto Apel Selected Essays: Ethics and the Theory of Rationality* (1996) menegaskan bahwa komunikasi harus dimengerti sebagai ke-nyata-an yang selalu sudah ada (Jerman: *immer schon!* Inggris: *always-already*) mendahului dan mendasari eksistensi manusia. Tersirat maksud di sini adalah bahwa komunikasi

menyatakan hakikat manusia sebagai relasi: apakah relasi itu bersifat negasi (pengingkaran atau penolakan) atau relasi itu bersifat afirmasi (pengakuan atau penegasan). Negasi atau afirmasi berlangsung tanpa kecuali di dalam dan melalui komunikasi.⁶ Apel dan sejawatnya Jürgen Habermas (1929-) menganalisis masalah-masalah sosial yang timbul dalam masyarakat modern pluralistik dengan teori etika diskursus. Keyakinan keduanya adalah realitas komunikasi merupakan hakikat manusia dalam pengalamannya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan warga negara. Dengan kata lain, komunikasi sebagai realitas yang menjadikan dunia kehidupan sehari-hari yang bersifat informal, spontan, dan intersubjektif; dan perkembangannya ke dalam sistem kehidupan yang bersifat formal, direncanakan, dan objektif. Oleh sebab itu, pemahaman dunia kehidupan yang informal, spontan, dan intersubjektif harus mengarahkan perkembangan kehidupan manusia dalam sistem yang formal, direncanakan, dan objektif. Hal ini dapat diterima karena pengembangan sistem dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan dunia kehidupan maka sistem yang berkembang secara formal, direncanakan, dan objektif harus tetap berorientasi pada penguatan dunia kehidupan dan tidak sebaliknya mengkolonisasi dunia kehidupan yang bersifat intersubjektif. Apabila dunia kehidupan, dalam hubungan intersubjektif itu, dikuasai dan dikendalikan oleh sistem, yang menekankan hubungan objektif, maka antar manusia dalam dunia kehidupan sehari-hari mengalami distorsi oleh penggunaan perangkat sistemik yang beroperasi dalam dunia sistem sehingga memerlukan penataan kembali cara kerja sistem sehingga sinkron dengan realitas dunia kehidupan. Sebagai akibat diferensiasi dalam dunia kehidupan, sistem hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hubungan intersubjektif dunia kehidupan. Apabila sistem berkembang menghancurkan hubungan intersubjektif, apakah penghancuran itu melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat nirnilai sekalipun tidak dapat dibenarkan. Sebuah sistem berkembang sebagai hasil diferensiasi dari dunia kehidupan maka kedudukannya adalah sub-sistem

dari sistem dunia kehidupan sebagai induknya. Sistem politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dll yang berhasil dikembangkan sebagai sub-sistem dunia kehidupan yang mandiri tetap terikat dengan tuntutan sebagai sub-sistem harus memberi kontribusi pada keseluruhan sistem dalam rangka peningkatan kualitas dunia kehidupan intersubjektif.

3. PANCASILA SEBAGAI MANIFESTASI NILAI-NILAI DUNIA KEHIDUPAN

Pernyataan tentang nilai-nilai dunia kehidupan digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri yang menyatakan hakikat kehidupan di dalamnya. Ciri dominan yang menyatakan hakikat kehidupan itu adalah relasi yakni, hubungan yang bersifat intersubjektif. Alam semesta adalah pernyataan mengenai lingkungan hidup pada umumnya dan lingkungan sosial pada khususnya sebagai ranah kehidupan manusia. Manusia hidup dan berkembang di dalam dunia kehidupan alamiah dan sosial. Dunia kehidupan itu mengungkap dengan jelas relasi yang menyatakan bahwa isi alam semesta berhubungan saling bergantung dan saling menentukan, *interdependence*. Kenyataan itu diketahui secara sangat terbatas karena akal budi manusia yang terbatas namun dalam pengalaman dan refleksi atas pengalaman mengungkapkan *insight* tentang suatu hubungan yang menjelaskan keagungan “karya” sang Pencipta. Dalam keterbatasannya, manusia menyadari eksistensinya tidak tanpa eksistensi yang lain maka kesadaran itu menegaskan eksistensi senada dengan ko-eksistensi. Ko-eksistensi adalah fakta dan diterima sebagai realitas *sine qua non*. Ciri paling menonjol dalam kehidupan alam semesta adalah *biodiversity* maka kebhinnekaan menentukan eksistensi individu dan eksistensi individu selalu dipahami dalam relasi dengan yang lain. Teori politik yang mengungkap kodrat manusia sebagai makhluk egois dipatahkan oleh kenyataan alamiah bahwa hidup selalu dijalani dalam kebersamaan, apakah disadari atau tidak. Teori kontrak sosial yang dikemukakan Thomas Hobbes (1588-1679) bahwa kesadaran relasi sebagai *modus vivendi* baru berkembang

di tahap negara bertentangan dengan kodrat kehidupan yang sedari awal adalah sosial.⁷ Teori ekonomi yang mengangkat *self-interest* tidak menisbikan manusia sosial karena transaksi demi perwujudan *self interest* mengandaikan relasi intersubjektif antara penjual dan pembeli. Jadi, egoisme adalah pernyataan sifat melawan kodrat.⁸ Dalam bukunya, *The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture* (1988), Capra Fritjof menyadari kelemahan rasionalitas sempit yang diklaim oleh ilmu-ilmu empiris dan teknologi dalam tiga dekade terakhir dalam Abad XX sebagai cara pandang dunia mekanistik yang menyesatkan sehingga kita diajak untuk mebali melihat hubungan yang dinamis antar semua kehidupan di alam semesta sebagai relasi. Cara pandang Capra dapat disebut sebagai cara pandang ekologis yang dalam arti luas dan mendalam mengungkap kesadaran tentang hubungan tak terpisahkan antara semua fenomena alam dan sosial yang saling mengandaikan.⁹ Dewasa ini, perdebatan mengenai hubungan itu kembali mengemuka sekurang-kurangnya perdebatan mengenai hubungan itu menghasilkan kesepahaman mengenai pentingnya perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan hidup sebagai landasan untuk memelihara lingkungan sosial secara harmonis dan adil.¹⁰

Jauh sebelum para ahli ilmu alam dan lingkungan secara khusus menularkan gagasan tentang pentingnya menjaga keanekaan hayati (*bidodiversity*) para pendiri republik sudah mengantisipasi pentingnya menjaga kebhinnekaan kehidupan sosial sebagai bagian dari lingkungan alam. Bukan kebetulan bahwa keragaman kehidupan sosial menggambarkan keragaman kehidupan di alam semesta. Justru karena manusia itu adalah mahluk berakal budi maka tuntutan untuk menjadikan keragaman itu pola pikir yang menuntunya perilakunya merupakan ungkapan kearifan yang bermutu tinggi. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan kearifan tersebut sebagai *insight* mengenai pemeliharaan lingkungan sosial sebagai bagian dari keutuhan lingkungan alam. Nilai-nilai itu tidak bersifat artifisial karena hidup dan mendasari eksistensi individu sebagai pribadi selalu berada dalam pengalaman relasi dan ko-eksistensi. Para pendiri republik menyadari

pentingnya kebhinnekaan sebagai kebenaran yang memerdekakan manusia dari siolasi dan eksklusivitas. Pernyataan kemerdekaan adalah keberanian untuk menerima dan mengakui perbedaan sebagai kenyataan eksistensi yang senantiasa berada dalam relasi. Dengan demikian perbedaan bukanlah kutuk tetapi berkah keluhuran harkat dan martabat manusia. Mengakui perbedaan dengan demikian tidak memiskinkan aktualisasi diri pribadi dan kelompok sebaliknya memperkaya dan memungkinkan pencapaian tertinggi kehidupan sebagai manusia.

Dengan dasar pemikiran di atas kita bisa menapak tilas jejak pencarian dasar negara dari kandungan ibu pertiwi yakni rahim bangsa Indonesia sendiri. Oleh sebab nilai-nilai Pancasila secara hakiki merefleksikan hakikat kehidupan di alam semesta maka secara langsung atau tidak langsung berlaku secara universal. Kebhinnekaan adalah wujud bangsa Indonesia dalam keanekaan suku, agama, ras, dan golongan yang sejak awal ditandai oleh relasi dari pelbagai perbedaan yang ada. Dengan demikian tidak salah untuk menyebut nilai-nilai Pancasila bersifat asli dan universal. Keasliannya terletak pada penggalian para pendiri bangsa dalam pembicaraan mereka mengenai dasar negara. Universalitas nilai Pancasila terletak pada hakikatnya sebagai prinsip hubungan atau relasi. Oleh sebab itu, tanpa menyebutnya Pancasila, nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar untuk menciptakan integrasi sosial di mana pun. Keunggulan kita adalah secara eksplisit menemukannya sebagai dasar kemerdekaan dan tekad untuk mewujudkan kemerdekaan itu sebagai relasi yang menjunjung tinggi kebhinnekaan bangsa Indonesia.

Gambaran di atas terlihat pada rapat persiapan kemerdekaan Indonesia oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, dan rapat penetapan presiden dan wakil presiden serta pengesahan Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Seluruh anggota PPKI kala itu berfungsi sebagai para wakil rakyat Indonesia membicarakan

dan menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Dasar Hukum Negara, dan Ideologi Negara. Inilah suasana kebatinan yang melatarbelakangi pemikiran mengenai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara bersifat final. Final tidak dalam arti bahwa pembicaraan mengenai Pancasila tidak lagi dilakukan di kemudian hari tetapi bahwa Pancasila sebagai tujuan perumusan dasar negara mencapai puncaknya berdasarkan prinsip *the better argument* yaitu nilai-nilai universal yang digali dan ditemukan dalam kebudayaan Indonesia yang majemuk dalam hal suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebagai *the better argument*, Pancasila merefleksikan nilai-nilai dasar yang dianut bangsa Indonesia sehingga Pancasila patut mendasari sistem hukum (UUD). Pancasila dilihat sebagai dasar hukum (moral/kodrat) sedangkan UUD adalah hukum dasar yang mewadahi sistem hukum positif. Dengan demikian Pancasila disebut final karena memenuhi tujuan (finalitas) perumusan dasar negara sebagai berikut.¹¹

3.1. Pandangan Dunia

Istilah pandangan dunia atau *worldview* adalah konsep fenomenologi yang dianggap sangat penting karena melalui pandangan dunia itu, jiwa dan watak seseorang atau sebuah masyarakat dapat dikenal. Jiwa adalah semangat atau dorongan vital yang terwujud sebagai watak atau karakter sebuah bangsa dalam cara pandang dan cara hidupnya (*way of life*). Para sosiolog menggunakan istilah ini untuk meneropong cara hidup yang berbeda-beda (*forms of life*) dari kelompok-kelompok masyarakat yang bersama-sama membentuk sebuah kehidupan bersama sebagai bangsa. Bung Karno pada pidatonya, 1 Juni 1945 menggunakan istilah *Weltanschauung* untuk merumuskan nilai-nilai yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bermasyarakat. Melalui pendekatan pandangan dunia, sebuah bangsa dapat dikenal sebagai sebuah kehidupan bersama. Di dalam fenomenologi, cara untuk mengenal apa yang menjadikan sebuah bangsa adalah sebuah kehidupan yang berdasar pada sebuah nilai bersama adalah

metode reduksi eidetic. Dengan metode ini, ekspresi jiwa dalam perilaku ditelusuri berbagai individu dalam masing kelompok diamati hingga nilai yang sama yang mengikat semua sebagai satu kesatuan. Nilai hakiki yang menjadikan sebuah bangsa adalah *eidos* (esensi) yang menyatakan kesatuan bangsa. Istilah Yunani yang dipergunakan dalam cara kerja fenomenologi ini dinamakan *epoche* yaitu, teknik menyisihkan atau menempatkan dalam kurung hal-hal aksidental pada sejumlah objek yang diteliti agar akal budi sampai pada esensi yang mengartikan keseluruhan objek itu sebagai satu kesatuan menurut hakikatnya. Perbedaan yang bersifat aksidental berlaku dan diharagai untuk memperkuat apa yang menjadi hakikat kesamaan. Meskipun Bung Karno tidak secara eksplisit mengatakan bahwa ia menggunakan fenomologi dengan metode eidetik dalam memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara namun itulah yang dilakukannya bahwa sebelum BPUPKI merumuskan dasar negara, hal utama yang harus dipatikan adalah nilai-nilai fundamental yang menjadi pandangan dunia atau Weltanschauung masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sesudah pandangan dunianya diketahui, baru pemikiran mengenai dasar negara (*Philosophische Grondslag*) dapat dirumuskan. Sebagai filsafat dasar NKRI, Pancasila adalah refleksi dunia kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari dari Sabang sampai Merauke.¹²

Eidos yang dikenal Bung Karno menjadi jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia adalah gotong royong yang dikenal dengan berbagai nama dalam berbagai suku dan budaya Indonesia. Kendati gotong royong merupakan bahasa Jawa namun konten yang terkandung di dalamnya sudah menjadi kebiasaan dalam praksis dunia kehidupan di seluruh wilayah yang akan menjadi NKRI. Nilai gotong royong itu menyatakan kebersamaan kendati manusia sebagai pribadi dan sebagai keluarga, komunitas, dan masyarakat berbeda-beda namun senantiasa terbuka, peduli, dan solider di dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah secara bersama-sama. Kebhinnekaan budaya dan suku serta ras dan golongan tidak menjadi ancaman karena semangat gotong royong senantiasa menjiwai

kebersamaan masyarakat dalam menghadapi berbagai masalah keluarga, komunitas, dan masyarakat. Di sini kebhinnekaan dirayakan sebagai berkah karena gawai pribadi, keluarga, komunitas, dan masyarakat dilihat sebagai panggilan untuk bantu-membantu, bahu-membahu, dan kerja sama dalam menyelesaikannya.

Itulah alasannya mengapa kebangsaan dalam rumusan Pancasila 1 Juni 1945 berada di urutan pertama. Tidak berarti pengurutan lima sila dilakukan untuk menunjukkan derajat nilai karena kelima sila berhubungan secara saling mengisi maka tidak ada sila yang satu lebih tinggi dari sila yang lain. Rumusan Pancasila 1 Juni 1945 yaitu: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Bung Karno, Pancasila dapat diperas lagi menjadi tri (tiga) sila dan selanjutnya menjadi eka (satu) sila yaitu gotong royong. Tentang ini dapat didiskusikan pada forum yang lain termasuk rumusan Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta yaitu: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain dua rumusan Pancasila di atas ada berbagai usul mengenai dasar negara namun sebagai gambaran, inilah rumusan Pancasila 1 Juni 1945 yang dikemukakan Bung Karno pada Sidang Pleno II BPUPKI secara historis mendahului rumusan Piagam Jakarta dan rumusan Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara.¹³

3.2. Dasar dan Ideologi Negara

Dasar Negara adalah pemikiran filosofis mengenai fondasi negara yang diambil dari nilai-nilai fundamental dunia kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila digali dari bumi ibu pertiwi dan dengan demikian merefleksikan jiwa

dan kepribadian bangsa Indonesia. Sebuah dasar negara yang tidak merefleksikan pandangan dunia dari masyarakatnya tidak akan kuat karena tidak dikenal. Sesuatu yang tidak dikenal bagaimana dihayati, dan dipraktikkan. Itulah alasannya, Bung Karno mengatakan tidak cocok mendasarkan NKRI pada pemikiran filosofis Marxisme, liberalisme, Tenno Heika, Kristianisme, atau Islamisme.¹⁴

Dasar Negara adalah visi sosial seluruh bangsa Indonesia mengenai cita-cita dan tujuan nasionalnya yang harus diwujudkan berdasarkan Dasar Negara sebuah negara. Karena, dasar negara adalah refleksi dari nilai-nilai fundamental (moralitas-prinsip-prinsip moral universal) dunia kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Dari nilai-nilai fundamental ini, Pancasila adalah Ideologi dan Dasar Hukum Negara. Sebagai ideologi, Pancasila merefleksikan visi sosial seluruh bangsa Indonesia dan atas dasar itu Pancasila adalah **Dasar Hukum** yang menentukan **Hukum Dasar** (Konstitusi) yakni, UUD 1945. Rumusan Pancasila yang dikenal sebagai dasar negara adalah rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh para wakil rakyat pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karena sebuah dasar negara merupakan visi sosial mengenai hakikat dan tujuan negara yang disepakati dan ditetapkan oleh wakil rakyat maka dasar negara itu berlaku sebagai *state fundamental norms* yang tidak dapat diubah (kecuali dengan membubarkan NKRI yang didirikan 17 Agustus 1945). Inilah alasan mengapa Pancasila menjadi ideologi negara karena Pancasila menjadi paham yang mengarahkan perilaku warga negara untuk memahami hakikat dan tujuan negara. Oleh sebab itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan (*declaration of independence*) sekaligus sebagai pernyataan hak-hak asasi manusia (*declaration of human rights*). Sebagai ideologi dalam arti

luas, Pancasila mengandung nilai-nilai universal dan karena itu apa yang diklaim Pancasila tidak berlaku eksklusif menurut akal sehat. Akan tetapi perumusan Pancasila sebagai dasar negara berasal dari dunia kehidupan bangsa Indonesia maka Pancasila merefleksikan keaslian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sehingga layak diklaim sebagai dasar negara Indonesia.¹⁵

4. KRISIS PENGAMALAN PANCASILA

Krisis pengamalan tidak muncul sebagai akibat dari satu sebab tunggal. Oleh sebab itu, untuk melacak akar dari krisis kita dapat mulai dengan menelusuri lembaran sejarah bangsa Indonesia dari awal kemerdekaan hingga hari ini. Alasannya, melalui sejarah riwayat “kesehatan” Pancasila dapat ditelusuri untuk mempelajari sebab-sebab dari krisis pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Diagnosis krisis pengamalan nilai-nilai Pancasila membantu langkah-langkah untuk memulai terapi yang diharapkan mengembalikan kesadaran masyarakat mengenai pengamalan Pancasila sebagai syarat merawat kebhinnekaan bagi integritas nasional sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia.

Perkembangan masyarakat Indonesia sejak kemerdekaan hingga hari ini menyumbang terjadinya krisis pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pertama, dengan meraih kemerdekaan terciptalah kenyamanan hidup secara baru lepas dari ketidaknyamanan yang tadinya dialami dari penjajahan bangsa asing. Solidaritas yang terbangun melalui pergerakan nasional menghimpun orang-orang dari berbagai suku menghadapi musuh bersama. Begitu penjajahan sudah diatasi dengan kemerdekaan, nilai-nilai solidaritas yang menjadikan kita satu Indonesia perlahan-lahan redup. Kebhinnekaan tidak lagi disyukuri sebagai anugerah untuk menyatukan energi sosial bagi upaya membangun dan mengembangkan kemerdekaan tetapi sebaliknya kebhinnekaan dicurigai sebagai biang kerok atau ideologi penyeragaman yang menghilangkan identitas suku, agama, ras, dan golongan. Kecurigaan ini bukan tanpa dasar karena pengamalan nilai-nilai Pancasila hanya sampai pada taraf verbalisme bahkan menjadi *lipservice*

para pemimpin yang berperilaku bukan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara tetapi sebagai pemangku kekuasaan dan pejabat negara.

Lemahnya bangsa Indonesia melakukan refleksi dan evaluasi nilai-nilai Pancasila di dalam menjalankan kehidupan sebagai anggota keluarga, komunitas, masyarakat, dan warga negara menjadi alasan kelamnya pengamalan Pancasila. Dunia pendidikan yang oleh para pendiri bangsa dan pemuka masyarakat dianggap sebagai ranah pembentukan watak dalam perkembangannya diisi oleh muatan pendidikan yang lebih berorientasi kepentingan ekonomi sehingga pendidikan menaikkan derajat persaingan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi mengabaikan apa yang oleh tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara disebut *character building* dan secara politik diungkapkan Sukarno dalam upaya merespon pembangun integrasi nasional sebagai *nation building*.

Pendidikan karakter mengutamakan nilai-nilai budaya untuk memperkuat kesadaran nasional sebagai bangsa. Hal ini harus menjadi titik tolak refleksi dan evaluasi terhadap cara kita merespon pembangunan masyarakat dan politik menuju integrasi nasional yang lebih solid dan kuat. Absennya pendidikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan informal maupun formal tidak mustahil menghasilkan insan pembangunan yang tercerabut dari akar budayanya. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh dikembangkan lepas dari koridor pemberdayaan watak dan politik warga negara dalam realitas kehidupan yang kendati berbeda-beda namun satu sebagai sebuah bangsa. Sudah ada banyak reaksi terhadap kemerosotan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan di bawah ini dikemukakan dua tanggapan yang tidak hanya mengeluhkan krisis tetapi juga mendiagnosa krisis dengan mengajukan beberapa cara melakukan perbaikan dan resolusi.

4.1. Diagnosis di Harian Umum Nasional Kompas

Narasi kebencian dalam ruang publik menjadi begitu mudah karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu pihak dan di pihak

lain pelemahan terhadap nilai-nilai fundamental dunia kehidupan oleh sistem pendidikan yang berorientasi pada kepentingan ekonomi kapitalis ketimbang pendidikan karakter masyarakat dan bangsa sebagaimana dibicarakan Sukarno dan Ki Hajar Dewantara. Opini yang dikemukakan Munawir Aziz dalam Harian Kompas secara gamblang melukiskan ruang publik berlumuran “darah” kebencian. Beliau menunjukkan bahwa sebuah survei yang dilakukan bersama antara Riset Wahid Foundation dan Lembaga Survei Indonesia pada bulan April 2016 menunjukkan realitas akan adanya responden yang mengaku pernah berpartisipasi dalam ujaran kebencian dan siap melakukan kekerasan melalui aksi radikal terhadap 10 kelompok sasaran kebencian yakni: LGBT menempati peringkat tertinggi 26,1%, komunisme 16,7%, Yahudi 10,7%, Kristen 2,2%, Syiah 1,3%, Wahabi 0,5%, Buddha 0,4%, Cina 0,4%, Katolik 0,4%, dan Khonghucu 0,1%. Tergambar dari survei tersebut perilaku anti kebhinnekaan yang merefleksikan sikap inklusif dari nilai-nilai Pancasila. 59,9% responden mengaku memiliki kelompok masyarakat yang dibenci dan 92,2% tidak setuju bahwa dari anggota kelompok yang dibenci menjadi pejabat publik. Lebih parah lagi 82,4% menolak hidup bertetangga dengan anggota kelompok yang dibenci.

Aziz mendiagnosis sebab-sebab narasi kebencian terjadi seiring dinamika politik 2017 yang merekam tekad negatif kelompok bangsa yang satu mengujar kebencian terhadap kelompok yang lain dengan memanfaatkan rumah-rumah ibadah untuk memproduksi ceramah kebencian tersebut terutama menjelang pemilukada Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Dinamika pemilukada telah usai namun benih-benih kebencian tidak ikut lekang bersama usainya peristiwa politik pemilukada. Hadirnya teknologi komunikasi yang semakin canggih seakan merawat tumbuh kembangnya kebencian di satu pihak dan ketakutan di pihak lain. Lembaga CSIS yang pada 20-30 Agustus 2017 melakukan survei atas 600 responden berusia 17-29 tahun dari 34 provinsi se-Indonesia mendapat secercah harapan dan optimism dari generasi milenial bahwa

penghayatan dan pengalamalan nilai-nilai Pancasila masih dianggap perlu untuk mengoreksi perilaku antisosial. Hasil survei CSIS memperlihatkan 26,9% sangat optimis bahwa nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman mengatasi krisis dan pedoman penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara, 62,3% responden cukup optimis, 52% responden tidak setuju dan 32% responden kurang setuju untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Perbaikan infrastruktur digital membuka peluang bagi penguatan ruang publik demi menciptakan integrasi sosial yang kuat sebaliknya dapat dimanfaatkan untuk pelemahan integrasi sosial melalui narasi kebencian. Dikatakan bahwa data dari WeAreSocial dan Hootsuite 2017 menunjukkan pengguna internet di Indonesia tumbuh menjadi 57% pada Mei 2017 yang berarti pengguna internet adalah 132 juta dari populasi dengan persentasi pengguna media sosial sebesar 40%. Hadirnya teknologi komunikasi mutakhir adalah berkah sekaligus bencana tergantung bagaimana menciptakan kondisi yang baik untuk memproduksi konten media yang tidak menyerang moralitas sebaliknya mendorong keberagaman mencapai titik temu yang kreatif bagi penguatan budaya dan politik NKRI. Tentu saja keberhasilan dari literasi media sangat bergantung pada pendidikan mental anak bangsa. Kita tidak bisa mengharapkan keberhasilan perubahan mental secara seketika maka pada titik mana pendidikan harus dimulai menjadi penting untuk dijadikan kebijakan politik pendidikan karakter anak bangsa. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hanya akan berhasil pada level pencegahan produksi konten media yang menyerang moral ketika pada satu titik situasi telah membahayakan keutuhan bangsa. Upaya sistematis harus diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional pada tahap yang sangat dini sehingga kebiasaan untuk menghargai keberagaman dan respek terhadap perbedaan dijadikan habitus baru yakni, menghayati dan mengamalkan Pancasila sebagai politik identitas nasional. Pendidikan harus dikemas sebagai sebuah proses yang mengajak peserta didik di usia dini untuk mengagumi

indahnyanya kebhinnekaan sebagai daya kecintaan tanah air dan daya tarik bagi bangsa lain. Pendidikan adalah sebuah proses *invitation to wonder*. Melalui kunjungan ke museum, monument, candi, dan prestasi budaya bangsa yang kaya raya peserta didik dibiasakan untuk mengagumi dan menangkap *insight* dari indahnyanya hidup dalam keberagaman namun satu sebagai bangsa yang merdeka dan kuat.¹⁶

4.2. Terapi Mingguan Hidup

Tip sederhana yang tampak mudah namun seringkali lalai diperhatikan sebagai solusi untuk tidak memperparah apa yang merisaukan masyarakat dari berseliweran konten kencian dalam penggunaan media sosial di ruang publik. Mulailah dari diri sendiri untuk tidak begitu saja SEND suatu konten, periksa lagi secara teliti pikirkan dampaknya sebelum memutuskan kirim. Karena mudahnya berkomunikasi melalui media sosial, aspek kewaspadaan seringkali dikorbankan sehingga sesuatu yang tadinya hanya dimaksudkan untuk konsumsi terbatas dapat viral di ruang publik dan menghasilkan “gempa” kebencian.

Mingguan Hidup berbicara tentang etika keutamaan yakni, sikap hidup yang bijaksana, adil, dan berani. Orang bijak tidak gegabah dalam bertindak karena harus memperhitungkan akibat negatif dari tindakannya yang dapat merusak kebersamaan. Adil berarti pandai menakar apa yang diberi karena secara objektif dibutuhkan sebagai pencerahan atau sesuatu yang menjadi hak si penerima berita. Ukurannya adalah berlaku yang kita sendiri mau kita diperlakukan maka sikap adil mencegah kita dari merusak keharmonisan hubungan. Bijaksana dan adil menyatakan kemampuan atau kualitas pribadi untuk menahan diri sehingga tidak bertindak melampaui batas. Pembatasan atas perilaku kita tidak merusak otonomi sejauh itu kita tahu bahwa melampaui batas berarti memasuki wilayah yang tidak kita kuasai sehingga bisa menjadi korban dari tindakan yang gegabah. Keberanian seringkali disalahartikan dengan nekad padahal berani adalah pertengahan dari sikap pengecut dan nekad. Nekad adalah

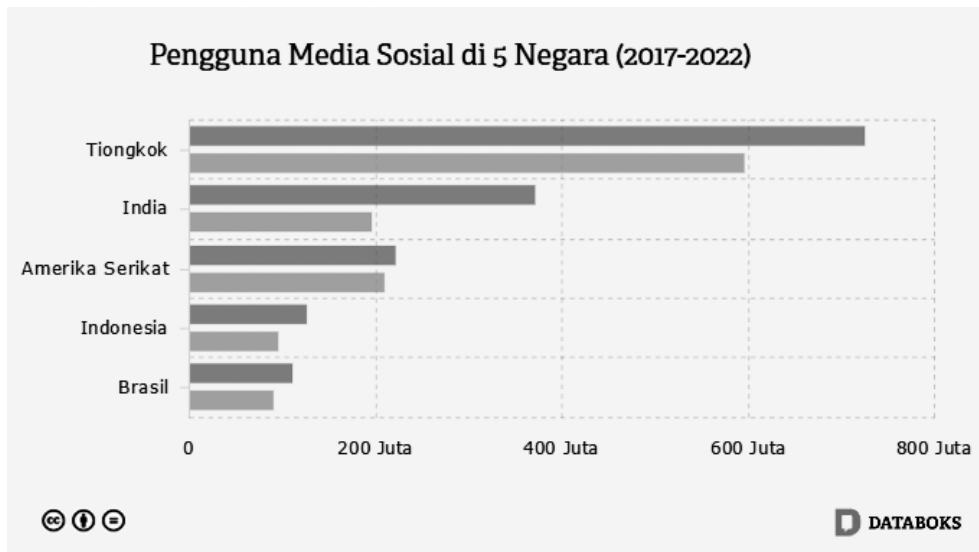
tindakan tanpa perhitungan sehingga kita bisa mengorbankan diri atau orang lain secara membabi buta. Pengecut sebaliknya enggan bertindak kendati situasi menjadi keharusa baginya untuk mengambil tindakan. Jadi, nekad dan pengecut merupakan titik ekstrim yang satu berlebihan (ekses) yang berkekurangan (deficit). Untuk itu sikap yang objektif adalah berani untuk melakukan apa yang harus dilakukan dengan tanggungjawab.

Terapi melalui pendidikan karakter atau pendidikan etika keutamaan bukan pula jalan pendek dan seketika memberi hasil. Keutamaan merupakan sebuah kualitas karakter yang dimiliki melalui latihan agar orang terbiasa melakukan apa yang dalam kebudayaan dipahami bernilai sehingga pada waktunya merespon situasi berdasarkan keutamaan yang telah menjadi habit dalam diri seseorang.¹⁷

5. MEDIA SOSIAL, ERA *POST-TRUTH*, DAN PERLUNYA ETIKA KOMUNIKASI

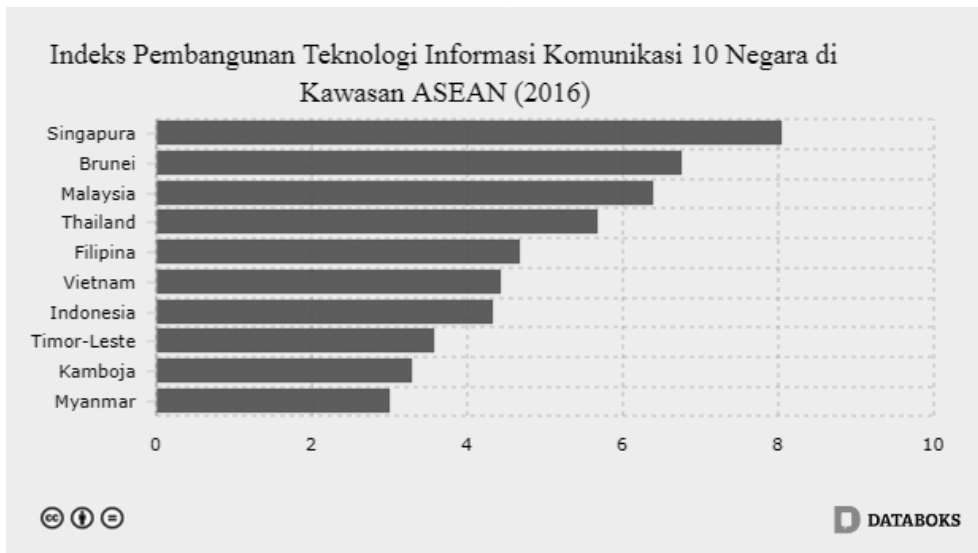
5.1. Perkembangan Teknologi Komunikasi

Di bawah ini disajikan data pengguna media sosial di lima negara dari tahun 2017-2022. Data menunjukkan bahwa Tiongkok adalah pengguna media sosial terbesar, pada tahun 2017 melebihi 600 juta pengguna dan pada tahun 2022 diperkirakan mendekati 1 miliar pengguna. India di kisaran 200 juta pada tahun 2017 dan akan mencapai kisaran 400 juta pada tahun 2022. Amerika Serikat pada tahun 2017 berada di kisaran 200 juta dan akan bertambah sampai kisaran di bawah 300 juta pengguna. Indonesia pada tahun 2017 berada di atas kisaran 100 juta dan akan bertambah mendekati kisaran 200 juta pengguna.



Grafik di atas menunjukkan pertumbuhan signifikan pengguna media sosial pada tahun 2022 di negara-negara berkembang yakni, kelipatan dari jumlah yang ada pada tahun 2017 sebagaimana terlihat pada India, Brazil, dan Indonesia. Sedangkan negara-negara maju memperlihatkan pertumbuhan yang cenderung stabil seperti pada Amerika Serikat dan Tiongkok. Itu berarti aktivitas media sosial akan semakin deras pengaruhnya dalam dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya di ruang publik pada negara-negara berkembang dibandingkan dengan negara-negara maju. Apabila aktivitas ruang publik pada 2017 menunjukkan dinamika sosial yang cenderung keras maka jika pertambahan jumlah pengguna media sosial pada tahun 2022 menjadi kelipatannya maka dapat diasumsikan bahwa jika penanganan aktivitas media sosial di ruang publik tidak berkembang akan menimbulkan kegaduhan ruang publik lebih dasyat. Dengan kata penanganan masalah nilai-nilai karakter dan kebangsaan akan bertambah rumit untuk diatasi. Hal ini akan diperberat oleh pembangunan teknologi informasi komunikasi di dalam negeri yang tidak merespon pertumbuhan populari pengguna sebagaimana terlihat pada tabel indeks pembangunan teknologi informasi komunikasi 10 negara di kawasan ASEAN di Indone-

sia jauh berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.¹⁸



Pertumbuhan pembangunan teknologi informasi komunikasi yang tertinggal akan berdampak pada masalah keamanan politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya karena efisiensi dan efektifitas control secara politik dan hukum dipengaruhi oleh kualitas pembangunan teknologi informasi itu sendiri. Pada tabel di bawah ditunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks pembangunan teknologi informasi komunikasi yang masih tergolong sedang pada tahun 2015-2016.¹⁹

ALEXANDER SERAN – KRISIS PENGAMALAN PANCASILA DAN PERLUNYA
PENGUATAN RUANG PUBLIK MELALUI ETIKA KOMUNIKASI:
SEBUAH PENDEKATAN ETIKA KEUTAMAAN



Sementara itu sistem operasi perangkat Mobile: Android, IOS Apple, dan lainnya dipimpin oleh smartphone Android yang menduduki peringkat hampir 80%. Artinya kemampuan pengguna Android untuk melakukan penetrasi ruang publik.²⁰



Hasil analisis atas menunjukkan pengguna media sosial ditemukan paling tinggi pada populasi anak-anak Generasi Z (Gen Z) yang lahir di era digital. Kelompok populasi ini tersebar di berbagai pulau sehingga penggunaan media sosial menjadi sarana yang sangat efektif dalam me-

nyaluran informasi. Meningkatnya pengguna internet di tanah air seiring membaiknya infrastruktur teknologi digital membuat pengguna media sosial Indonesia juga terus bertambah dan diperkirakan pada tahun 2022 akan mencapai lebih dari 253 juta pengguna, atau meningkat lebih dari 30 persen. Pertumbuhan pengguna media sosial pada generasi Z akan menimbulkan tiga fenomena yang menjadi sumber krisis yaitu: (a) pendeknya jarak, (b) serentaknya waktu, dan (c) sempit ruang gerak²¹.

Untuk menjelaskan pendeknya jarak mari kita lihat sejarah. Kristoforus Kolumbus (1451-1506) yang bernama asli Genoa, Italia, Christoffa Corombo memimpin sebuah penjelajahan yang didanai oleh Ratu Isabella dari kerajaan Spanyol dan kemudian tiba di benua Amerika pada tanggal 12 Oktober 1492. Konon dibutuhkan waktu 3 bulan lamanya hingga berita penemuan Amerika oleh Kolumbus tersebut sampai ke Spanyol. Apakah Kolumbus adalah orang pertama yang menemukan benua Amerika (?) Ada banyak perbedaan pendapat, namun ada dua hal penting. **Pertama**, dipastikan bahwa bumi itu “bulat” versus bumi “datar” sehingga orang bisa mencapai Timur Jauh dari arah Barat. **Kedua**, percepatan arus informasi dari satu titik di belahan bumi ini semakin cepat untuk diketahui di titik terjauh dari tempat kejadian/ peristiwa.

Perihal keserentakan waktu, apa yang terjadi pada penemuan benua Amerika oleh Kolumbus memerlukan tiga bulan perjalanan barulah informasi temuannya untuk sampai kepada ratu Spanyol. Berbeda dengan masa kini, Presiden Donald Trump “kentut” di White House “baunya” dapat “serentak” dirasakan oleh kita semua yang sekarang di Indonesia. Pertanyaannya, pertama, bagaimana filsafat mempertahankan dalilnya bahwa “Tidak mungkin seseorang berada di dua tempat berbeda pada waktu yang sama?”. Kedua, bagaimana, hukum mempertahankan rasionalitas “alibi” untuk membela seseorang yang diduga/disangka pelaku padahal ada bukti kuat bahwa ia berada di tempat lain pada saat kejadian. Apakah teknologi dapat menjelaskan keserentakan seseorang berada di dua tempat pada waktu bersamaan? Atau, fiksikah menjatuhkan hukuman

pada seseorang dengan alibi (Latin: tempat lain) yang kuat mengenai tiadanya jejak (sebagaimana diduga) pada tempat kejadian perkara?

Tentang sempitnya ruang gerak dapat disaksikan sekarang bahwa media tidak hanya menjadikan jarak dalam ruang dan waktu menjadi pendek tetapi juga mempersempit ruang interaksi “lintas” generasi. Alvin Toffler, dalam bukunya *The Future Shock* (1970) menalar mengenai guncangan masa depan akan terjadi dalam revolusi informasi. Douglas Rushkoff mempertegas masa depan Toffler itu sedang terjadi dalam karyanya *The Present Shock* (2013). Menarik untuk mempelajari argument Rushkoff bahwa segala sesuatu terjadi pada sekarang dan di sini. Populasi manusia di dunia pada laporan PBB, 2017 adalah 7,6 miliar dan akan menjadi 9,8 di tahun 2050. Indonesia akan menembus 300 juta penduduk pada tahun 2050. Dengan angka harapan hidup rata-rata 66,57 tahun (64,52 untuk laki-laki dan 68,76 untuk perempuan) di tahun 2017. Angka harapan hidup orang Indonesia 68,9 saat ini dan akan mendekati 75 tahun pada 2050.²² Masalahnya di sini adalah keserentakan kehidupan dari berbagai generasi dari populasi yang besar itu ditambah dengan angka harapan hidup yang semakin tinggi dalam ruang dan waktu yang sama akan menimbulkan persoalan yang pelik. Beda generasi berarti beda pengalaman dan beda pula cara pandang mengisi keseharian hidup di antara berbagai *dos* dan *don'ts*. Perbedaan generasi dewasa ini menimbulkan masalah besar antara kakek-nenek, ibu-bapak, dengan anak-anak, cucu-cucu dan cicit-cicit. Lemahnya orang Indonesia berpikir dan bersikap kritis. Banyak konflik sosial terjadi sebagai akibat kurang sabarnya orang mengambil waktu untuk berpikir sebelum bertindak. Tindakan kita dalam berbagai aksi negatif dikarenakan kita tidak berpikir (kritis). Dasar aksi adalah perasaan (emosi) dan napsu. Keduanya menurut I. Kant (1724-1804) adalah tindakan irasional. Perasaan (emosi) dapat dikelola menjadi keutamaan tetapi napsu tidak demikian. Napsu adalah sifat kegilaan irasional. Tiga jenis napsu yang menurut Kant membuat manusia gila adalah kekayaan (harta/uang), kuasa (otot dan urat), dan hormat (prestise).

Nilai-nilai Pancasila terkait keutamaan yang dapat dibiasakan melalui pendidikan dalam rumah, komunitas, dan masyarakat menjadi habitus. Karena nilai bersifat subjektif maka diperlukan klarifikasi dan distingsi sebagai syarat untuk melakukan pilihan cerdas untuk bertindak bijak. Fenomena krisis yang nyata sebagai *das Sein* dalam ruang publik, berseliweran melalui media sosial dalam berbagai bentuk seperti: ujaran kebencian (*hate speech*), perilaku anti-social (*anti-social behavior*) seperti intoleransi, mengeksploitasi stereotip (*stereotypes*), mengunggah konten media yang menyerang moral (*morally offensive content*), dsb. Topik diskusi kita hari “menjadi anak mud zaman now yang smart dan bijak bermedia” adalah sisi kritis dari apa yang seharusnya, *das Sollen*, dilakukan sebagai perintah moral (*moral imperatives*): Amalkan Pancasila! *How to do good and how to avoid evil through social media?* Di sini keluarga menjadi dasar tak tergantikan untuk melahirkan dan merawat model komunikasi intersubjektif yang didasarkan pada perasaan (emosi) dan cinta. Kita boleh marah atau tidak senang tetapi sebagai saudara kita minta maaf dan memaafkan. Kita juga belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, yang menyakitkan maka kita harus melatih diri dengan kebajikan menahan diri (*temperance*), kita harus mengatakan salah itu salah tetapi cara mengatakannya harus benar, itulah keadilan bukan pengecut tetapi juga tidak nekat. Berani adalah keutamaan keadilan. Untuk berlaku adil diperlukan kemahiran menimbang antara pengecut dan nekat sehingga keberanian mengatakan yang salah mempunyai dampak perubahan. Adil itu tahu batas, tidak melampaui batas. Melampaui batas secara nekat, *vice*; bertindak pada batasnya adalah *virtue*. Melampaui keutamaan adalah cinta (*love*). Max Scheler mengatakan *justice is the minimum of love; love is the maximum of justice*. Sebagai orang muda Katolik sama seperti orang dewasa Katolik dipanggil untuk melakukan keadilan pada tingkat maximum, cinta kasih tetapi jika tidak kita harus adil. Tahu batas sudah cukup kalau boleh lebih melakukan perintah cinta kasih. Artinya apa? Kalau tahu bahwa di media sosial banyak hal negatif jangan ikut “ngomporin” tetapi berlaku adil

menempat diri pada batas yang dibolehkan karena melampaunya adalah *excess*, kekurangan atau kelebihan. (*vices*). Komunitas dan masyarakat adalah ekstensi dari keluarga. Rasa kekitaan, *we-feeling* dalam relasi intim keluarga dapat diperluas meliputi hubungan antar anggota komunitas dan masyarakat. Relasi keintiman sebagai saudara dalam keluarga ketika dibawa ke komunitas dan masyarakat harus dijaga lebih saksama karena lingkungan relasinya di situ lebih kompleks dan bhinneka. Misalnya, kita satu universitas tetapi saya orang Timor yang tinggal di kota Kranji dan sehari-hari bekerja di Atma Jaya sebagai dosen, dst. Theresia Benedicta adalah orang Jawa, Solo, fotografer, perempuan, dst. Relasi persaudaraan antara saya dan Theresia Benedicta tidak begitu saja mengambil over relasi dalam keluarga. Demikian halnya, relasi kita di politik dengan sesama anggota dari berbagai latar belakang yang lebih bhinneka. Jika kita sukses berelasi atas dasar perasaan (emosi) dan cinta di keluarga maka hal itu menjadi modal untuk kita bisa hidup di komunitas, dan kemudian di masyarakat yang lebih bhinneka.

5.2. Era *Post-Truth*

Seiring perkembangan teknologi komunikasi digital, penggunaan media sosial telah menyuburkan lahan bagi hadirnya era baru “post-truth” yang memanfaatkan teknologi komunikasi digital untuk memuluskan klaim kebenaran berdasarkan penilaian subjektif yang selama ini tersingkirkan oleh klaim kebenaran yang didasarkan penilaian objektif. Apa yang diklaim benar dalam era *post-truth* tidak karena dibuktikan dengan fakta tetapi karena klaim itu dikehendaki oleh orang atau kelompok yang mengatakannya. Fakta objektif tidak lagi menjadi ukuran benar daripada apa yang dikatakan seseorang atau suatu kelompok yang mengklaim sesuatu benar karena merasa benar atau meyakini benar bukan karena berdasarkan fakta atau pengakuan orang lain.

Pemaksaan kehendak agar sesuatu diakui benar oleh orang lain menutup ruang keterbukaan dan komunikasi untuk berdialog sehingga

apa yang dipaksakan menempuh jalur perintah atau paksaan sepihak, monolog. Untuk memuluskan pemaksaan kehendak ini media sosial digunakan sebagai sarana untuk memproduksi hoax atau berita palsu yang ditempatkan diruang publik untuk meruncing konflik antar individu atau kelompok atas tafsir subjektif yang diklaim sebagai kebenaran atau fakta. Di sini ujaran kebencian, fitnah, dan amarah dijadikan alasan untuk merebut tujuan politik *post-truth* itu sendiri dalam bentuk manipulasi dengan menciptakan dan menyebarkan ketakutan kepada pihak lawan agar mengakui, menyetujui, dan menerima apa yang dipaksakan. Jadi, politik *post-truth* adalah pertarungan yang diwarnai oleh kegilaan bermuka tiga yakni, gila kuasa, gila harta, dan gila hormat. Ketika ketiga kegilaan ini menghiasi ruang publik sebagai panggung pertarungan politik maka kebenaran tidak lagi berurusan dengan akal tetapi otot maka yang keluar sebagai pemenang adalah orang atau kelompok yang lebih kuat tenaganya, lebih besar dan lebih banyak jumlahnya.²³ Oleh sebab itu, di bawah panggung pertarungan politik *post-truth* terkuburlah keadilan yang dalam sistem demokrasi tidak ditakar menurut ukuran mayoritas dan minoritas dan kebenaran yang dalam ilmu pengetahuan tidak diklaim secara subjektif tetapi berdasarkan fakta objektif. Apabila panggung politik *post-truth* langgeng berdiri di atas pusara keadilan dan kebenaran maka sistem demokrasi yang dielu-elukan sebagai landasan politik berharkat dan bermartabat manusia rasional menjadi ironi negara hukum yang selama 73 tahun dengan susah payah diperjuangkan bangsa ini menjadi omong kosong besar. Lalu, bagaimana dengan niat suci dan jerih payah para pahlawan pencetus dan pendiri negara ini harus berakhir disia-siakan kita generasi penerus?

5.3. Terapi Etika Komunikasi

Untuk mengatasi krisis peng-amal-an nilai-nilai Pancasila kita harus kembali kepada sejarah bagaimana Pancasila lahir sebagai filsafat dasar NKRI dan sekarang oleh Jokowi dijadikan Roh Revolusi Mental.

Sejarah menurut GWF Hegel (1770-1831) dalam bukunya *Philosophy of History* (2001) dan *Philosophy of Rights* (2003) adalah locus dari insight atau konteks di mana realitas tampak secara objektif. Realitas itu tampak di dalam dan melalui bahasa (tradisi). M. Heidegger (1889-1976) menyebutnya *the house of Being* dalam bukunya *Being and Time* karena apa pun saja adanya dalam dan melalui bahasa. Pernyataan eksistensi manusia ada di dalam komunikasi dan bahasa adalah medianya. Bagaimana supaya bahasa memainkan peran utamanya dalam komunikasi untuk menyatakan aktualisasi eksistensi manusia sebagai pribadi dan anggota masyarakat? Jürgen Habermas dan Karl-Otto Apel mendalilkan komunikasi sebagai ciri hakiki manusia. Mereka menggunakan istilah Jerman *immer schon* atau Inggris *always already* untuk menjelaskan komunikasi sebagai kenyataan yang selalu sudah ada mendahului eksistensi manusia sebagai pribadi dan kesadarannya itu diperoleh dari komunikasi (relasi) dengan orang lain.

Penerimaan nilai-nilai Pancasila sesuai teori etika komunikasi berdasarkan prinsip *The Better Argument*. Setiap orang, setiap komunitas, setiap masyarakat menyadari eksistensinya sebagai pribadi, komunitas, atau masyarakat dalam relasinya dengan pribadi, komunitas, dan masyarakat yang lain. Dengan kata lain, pengakuan terhadap yang lain menegaskan eksistensi sebagai pribadi, komunitas, atau masyarakat. Pancasila dirumuskan dari nilai-nilai yang diakui bersama dengan demikian diterima sebagai alasan untuk memelihara kebersamaan dalam perbedaan.

Hanya tentang apa yang sama dapat disepakati supaya perbedaan dapat dihargai dan dihormati. Perbedaan yang hakiki seperti agama, ras, tradisi dll tidak bisa disepakati tetapi dihargai dan dihormati untuk hidup berdasarkan apa yang diakui (disepakati) bersama. Alasan untuk menerima (sepakat) atau menolak (tidak sepakat) disepakati untuk memelihara pengakuan akan kebebasan (martabat manusia) sekaligus juga pengakuan mengenai keadilan (sosialitas manusia). Nilai-nilai Pancasila tidak menyangkut perbedaan tetapi kesamaan pandangan yang diterima lebih baik untuk memelihara kebebasan pribadi dan keadilan sosial. Menolak

apa yang lebih baik “sama” bagi semua orang dengan memaksakan sesuatu yang menurut diri sendiri (kelompok sendiri) lebih baik merupakan pemaksaan kehendak. Maka apa yang lebih baik itu menuntut pengorbanan untuk tidak menang sendiri karena memperlakukan yang terbaik menurut kepentingan sendiri adalah memaksakan kehendak. Dalam kesepakatan, prinsip the better argument merupakan *the unforced force* yang jika ditolak maka penolaknya akan terperangkap di dalam apa yang disebut habermas performative contradiction.

Argumen bahwa Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi final dalam pemahaman the better argument bukan the best argument karena alasannya harus lebih baik bagi semua pihak. Itulah sebabnya Dasar Negara di mana pun ditempatkan sebagai pembukaan Konstitusi yang menyatakan hak-hak asasi manusia yang berlaku universal sehingga tidak diubah. Pancasila sebagai Dasar Negara tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 sebagai pernyataan “konsensus nasional” tentang kemerdekaan (*Declaration of Independence*) sekaligus adalah pernyataan hak-hak asasi manusia (*Declaration of Human Rights*) dibangun atas prinsip *the better argument that is equally good for all*. Oleh sebab itu, meniadakan Pancasila berarti membubarkan negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

Penerapan prinsip *The Better Argument* bagi orang muda dalam bermedia harus didasarkan pada prinsip bahwa apa yang disampaikan dapat dimengerti, penyampaian itu ditujukan kepada orang lain tentang sesuatu untuk diketahui, pastikan bahwa dengan itu Anda dianggap mengerti apa yang Anda sampaikan, dan harapan Anda sebagai komunikator adalah saling memperkaya pemahaman tentang apa yang dibicarakan dengan komunikan.

Dalam kerangka inilah pemikiran Notonagoro menjadi penting, karena ia merumuskan landasan filsafat hukum bagi posisi Pancasila sebagai dasar negara. Menurutnya, Pancasila yang teksnya berada dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan Kaidah Fundamental Negara (Staatfundamentalnorms)

yang mempunyai kekuatan sebagai grundnorm. Pancasila adalah cita-cita hukum (rechtsidee) yang menjadi pemandu seluruh pembuatan hukum. Dalam kaitan ini, seluruh produk hukum ditujukan untuk mencapai ide-ide yang dikandung oleh Pancasila, sehingga Pancasila bisa menjadi yardstick, tolok ukur normatif, yang menilai kesesuaian atau pelencengan produk hukum dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam praktek ketatanegaraan, Pancasila menjadi hukum dasar sebagai sumber bagi semua undang-undang menyangkut politik dan ekonomi. Setiap undang-undang seharusnya menerjemahkan Pancasila secara keseluruhan atau sila tertentu dari Pancasila, sedangkan penyimpangan undang-undang dari Pancasila sebagai dasar hukum harus ditolak. Karena itu pula, sangat dibutuhkan politik hukum yang jelas sebagai penerjemahan dan implementasi Pancasila sebagai dasar hukum Negara Indonesia. Sebagai dasar hukum Pancasila menjadi jiwa sekaligus tolok ukur dari semua peraturan perundangan baik di pusat maupun di daerah.

6. PENUTUP

Jangan takut bermedia dan jangan pula gegabah. Orang yang takut menderita sudah menderita apa yang ditakutinya. Menggunakan media adalah suatu keharusan untuk membangun citra positif jika media digunakan secara bertanggung jawab. Sebaliknya penggunaan media secara tidak bertanggung jawab mendatangkan kerugian dalam berbagai bentuknya. Menolak menggunakan media tidak saja bodoh tetapi tidak bermoral. Alasannya, media adalah sarana yang mempermudah kita meningkatkan kebersamaan, solidaritas, dan peduli sebagai sesama keluarga, komunitas, masyarakat, negara, dan warga dunia; hanya jika kita menggunakannya secara cermas dan bijaksana.

Untuk studi lebih lanjut, mempelajari dan memahami penggunaan media dengan baik adalah menjaga penggunaan media sebagai sarana pencitraan secara positif dan sebaliknya mengendalikan media sebagai sarana memproduksi kekayaan secara material. Jika media dikendalikan secara komersial maka atas nama keuntungan apa pun dapat diberitakan

atau diiklankan demi uang. Nilai komersial menghancurkan nilai estetik dari media yang sejatinya menjadi sarana pencitraan. Pencitraan menyumbang bagi pendidikan moral tentang apa yang oleh Jean Baudrillard dinamakan *sign value* yakni, prestise yang direpresentasikan oleh tanda. Pancasila sejatinya adalah prestise moralitas budi luhur yang menyatakan kehormatan dan kewibawaan sebuah bangsa maka pemeliharaannya sebagai *sign value* tidak tanpa penggunaan media.

CATATAN AKHIR

¹ Lana Indralak dan John Giordano, “Chantal Mouffe and Religious Pluralism: Agonistic Experiments in Non-Western Societies” dalam *Prajñā Vihāra* Vol. 18 No 2, July - December 2011, by Assumption University Press, hal. 84-93.

² Richard Rorty, *Contingency, Irony, and Solidarity* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).

³ Richard Rorty, *Philosophy and the Mirror of Nature* (Princeton: Princeton University Press, 1979).

⁴ Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action: Life-world and System, a Critique of Functionalist Reason*, Vol. II. Diterj. dari teks Jerman *Theorie des kommunikativen Handelns, Band 2, Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft* oleh Thomas MacCarthy (Boston: Beacon Press, 1987).

⁵ Jürgen Habermas, Legitimation Crisis. Diterj. dari teks Jerman Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus oleh Thomas MacCarthy (Boston: Beacon Press, 1973).

⁶ Karl-Otto Apel, *Karl-Otto Apel Selected Essays: Ethics and the Theory of Rationality*, diedit dan diberi introduksi oleh Eduardo Mendieta (New Jersey: Humanities Press International Inc., 1996), hal. x-xx.

⁷ Thomas Hobbes, *Leviathan* (University of Lodon Press, 1994).

⁸ Evensky, Jerry. 2005. “Adam Smith’s “Theory of Moral Sentiments”: On Morals and Why They Matter to a Liberal Society of Free People and Free Markets”, *The Journal of Economic Perspectives*, vol. 19, (3), pp. 109-130.

⁹ Fritjof Capra, *The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture* (Simon and Schuster, 1982/1988).

¹⁰ *Ethical Perspectives: A Quarterly Review*, vol. 21., Nr. 1., March, 2014

¹¹ RI. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia and Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia*. Saafroedin Bahar, et al.Ed

ALEXANDER SERAN – KRISIS PENGAMALAN PANCASILA DAN PERLUNYA
PENGUATAN RUANG PUBLIK MELALUI ETIKA KOMUNIKASI:
SEBUAH PENDEKATAN ETIKA KEUTAMAAN

(Jakarta: Sekretarian Negara, 1995).

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid. Lihat juga Marsono, *Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1999-2002* (Jakarta: CV Eko Jaya, 2005)

¹⁶ Munawir Aziz, “Melawan Narasi Kebencian” dalam Kolom OPini Komas, Jumat 19 Januari 2018, hal 7.

¹⁷ Mingguna Hidup, edisi 17 Desember 2017.

¹⁸ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/12/15/pembangunan-teknologi-informasi-indonesia-masih-masuk-kategori-sedang>

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² http://int.search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?ct=ARS&n=783a3e-7c&p2=%5EY6%5Exdm007%5ES23144%5Eid&pg=GGmain&pn=1&ptb=78BE-9FE9-84C1-4F9C-82DF-EB3CF7CE4E43&q=CNX-2qXO_tUCFZGM-jwodoN0HRg&ss=sub&st=sb&searchfr=RatRata+Harapan+Hidup+Orang+Indonesia+Adalah+Berumur+68%2C9&feedurl=ars%252Ffeedback%253ForiginalQuery%253Dusia%252Bharapan%252Bhidup%252Bbrata-rata%252Bmanusia%252Bmenurut%252Bpbb%2526relatedQuery%253Drata-rata%252Bharapan%252Bhidup%252Borang%252BIndonesia%252Badalah%252Bberumur%252B68%25252C9&tpr=jrel3&cots=1516539766057&cots=1516539766236

²³ M.Subhan SD, “Kekumuhan Politik ‘Post-Truth’ “dalam Kolom Politik, Harian Kompas, Sabtu 20 Januari 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Apel, Karl-Otto. 1996. *Karl-Otto Apel Selected Essays: Ethics and the Theory of Rationaity*, diedit dan diberi introduksi oleh Eduardo Mendieta. New Jersey: Humanities Press International Inc.

Hobbes, Thomas 1994. *Leviathan*. London: University of Lodon Press.

Aziz, Munawir. 2018. “Melawan Narasi Kebencian” dalam Kolom Opini Kompas, Jumat 19 Januari.

Capra, Fritjof. 1988. *The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture*. Simon and Schuster.

Evensky, Jerry. 2005. “Adam Smith’s “Theory of Moral Sentiments: On Morals and Why

- They Matter to a Liberal Society of Free People and Free Markets”, *The Journal of Economic Perspectives*, vol. 19, (3).
- Habermas, Jürgen. 1987. *The Theory of Communicative Action: Life-world and System, a Critique of Functionalist Reason*, Vol. II, diterj. dari teks Jerman *Theorie des kommunikativen Handelns, Band 2, Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft* oleh Thomas MacCarthy. Boston: Beacon Press.
- . 1973. *Legitimation Crisis*, diterj. dari teks Jerman *Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus* oleh Thomas MacCarthy. Boston: Beacon Press.
- Hegel, G.W. F., 2001. *Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte* (1822), diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *Lectures on the Philosophy of History* oleh J. Sibree, MA dengan kata pengantar oleh Charles Hegel. Kitchener. Ontario: Batoche Books.
- . 2003. *Grundlinien der Philosophie der Rechts* (1820), diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *Elements of the Philosophy of Right* oleh H.B. Nisbet dan diedit oleh Allen W. Wood. Cambridge: Cambridge University Press.
- Heidegger, Martin. 1962. *Being and Time*, 7th ed., diterj. dari teks Jerman *Sein und Zeit* oleh John Macquarrie dan Edward Robinson. San Francisco: Harper and Row.
- Hobbes, Thomas. 1997. *Leviathan* (1651), diedit oleh Mikhael Oakeshott dengan kata pengantar oleh Richard S. Peter. New York: A Touchstone Book.
- <http://int.search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?ct=ARS&n=783a3e-7c&p2=%5EY6%5Exdm007%5ES23144%5Eid&p-g=GGmain&pn=1&ptb=78BE9FE9-84C1-4F9C-82DFEB3CF-7CE4E43&q=&si=CNX2qXO tUCFZGMjwodoN0HRg&ss=sub&st=s-b&searchfr=RatRata+Harapan+Hidup+Orang+Indonesia+Adalah+Berumur+68%2C9&feedurl=ars%252Ffeedback%253ForiginalQuery%253Dusia%252Bharapan%252Bhidup%252Bratarata%252Bmanusia%252Bmenurut%252Bpbb%2526relatedQuery%253Dratarata%252Bharapan%252Bhidup%252Borang%252Bindonesia%252Badalah%252Berumur%252B68%25252C9&tpr=jrel3&ots=1516539766057&ots=1516539766236>
- Kuhn, Thomas. 1996. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: Chicago University Press.
- Lana Indralak dan John Giordano. 2017. “Chantal Mouffe and Religious Pluralism: Agonistic Experiments in Non-Western Societies” dalam *Prajñā Vihāra* Vol. 18

ALEXANDER SERAN – KRISIS PENGAMALAN PANCASILA DAN PERLUNYA
PENGUATAN RUANG PUBLIK MELALUI ETIKA KOMUNIKASI:
SEBUAH PENDEKATAN ETIKA KEUTAMAAN

No 2, July – December, Assumption University Press,

Marsono. 2005. *Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1999-2002*. Jakarta: CV Eko Jaya.

Mendieta, Eduardo. 2002. *The Adventures of Transcendental Philosophy: Karl-Otto Apel's Semiotics and Discourse Ethics*. Lanham/Boulder/New York/Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

Mingguan Hidup, edisi 17 Desember 2017.

Niemeyer, Simon A. 2014. *Ethical Perspectives: A Quarterly Review*, vol. 21., Nr. 1., March.

RI. 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia and Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia*. Saafroedin Bahar, et al.ed. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rorty, Richard. 1989. *Contingency, Irony, and Solidarity*. Cambridge: Cambridge University Press.

———. 1979. *Philosophy and the Mirror of Nature*. Princeton: Princeton University Press.

Rushkoff, Douglas, 2013. *The Present Shock*. New York: Penguin Group, Inc.

Subhan SD, M. 2018. “Kekumuhan Politik ‘Post-Truth’ “dalam Kolom Politik, *Harian Kompas*, Sabtu 20 Januari.

Thaib, Dahlan. et al. 2005. *Teori Hukum dan Konsitusi*. Jakarta: PT Raja Grasindo Persada.

Toffler, Alvin. 1970. *The Future Shock*. USA: Random House.

Toynbee, A. 1962. *A Study of History*, vol.3: The Growths of Civilizations. Chestfield, Kent UK: OUP.